

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI TERHADAP
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong)

2015 -2021

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

RIZKY MAULIANIKA

1501035164

S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2022


HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong 2015-2021)
Nama Mahasiswa : Rizky Maulianika
NIM : 1501035164
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : S1 Akuntansi

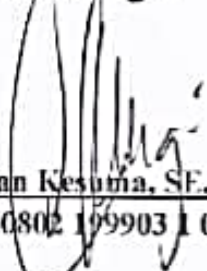
Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Prof. Dr. Hj. Sri Mintarti, M.Si
NIP. 19551127 198910 2 001

Pembimbing II


Agus Iwan Kesuma, SE., MA
NIP. 19750802 199903 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Svarifah Hidayah, S.E., M.Si
NIP.19620513 198811 2 001

Lulus Ujian Tanggal : 28 Juni 2022

SKRIPSI INI TELAH DINYATAKAN LULUS

Judul Skripsi : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada kantor pelayanan pajak pratama tenggarong tahun 2015-2021)


Nama : Rizky Maulianika

NIM : 1501035164


Tanggal Ujian : 28 Juni 2022

TIM PENGUJI

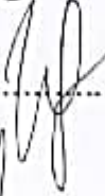
1. Prof. Dr. Hj. Sri Mintarti, M.Si
NIP. 19551127 198910 2 001

1. 

2. Agus Iwan Kesuma, SE., MA
NIP. 19750802 199903 1 001

2. 

3. Yunus Tete Konde, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA
NIP. 19590720 198903 1 002

3. 

3. Ibnu Abni Lahaya, S.E., M.S.A
NIP. 19851206 200812 1 002

4. 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik dalam suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya orang lain. kecuali yang secara tertulis diikuti dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia skripsi dan gelar sarjana, atas nama saya dibatalkan, serta diproses dengan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 13 Juni 2022



Rizky Maulianika

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK

KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizky Maulianika

NIM : 1501035164

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman. Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalti Free Right) atas skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong 2015-2021)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non-Eksklusif ini kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih, media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Samarinda, 28 Agustus 2022

Yang menyatakan



Rizky Maulianika

RIWAYAT HIDUP

Rizky Maulianika, lahir pada 14 Juli 1997 di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Penulis merupakan anak terakhir dari empat bersaudara dari pasangan bapak Syahrial.K dan ibu Mariani. Pada tahun 2003 memulai pendidikan tingkat dasar di Sekolah Dasar Negeri 024 Samarinda dan lulus pada tahun 2009. Lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Samarinda dan lulus pada tahun 2012. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Negeri 3Samarinda dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015, penulis berkesempatan meneruskan studi di Universitas Mulawarman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi, jenjang studi Strata Satu (S1) melalui jalur SNMPTN. Pada tahun 2018 melaksanakan program studi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan XLIV di Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 28 Agustus 2022

Penulis,

Rizky Maulianika

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas ridanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi pada Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Pajak Pratama Tenggarong tahun 2015-2021)”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman, Samarinda.
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.
3. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan selaku Dosen Penasehat yang telah membantu dan memberikan arahan selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
4. Dr. H. Zaki Fakhroni, M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

5. Prof. Dr. Hj. Sri Mintarti, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan secara menyeluruh, nasihat serta semangat yang memotivasi penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Agus Iwan Kesuma SE., MA., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan secara menyeluruh, nasihat serta semangat yang memotivasi penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Seluruh staf Jurusan, Akademik, dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang senantiasa memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Kedua Orang Tua saya tercinta, Bapak Syahril dan Ibu Mariani, serta Kakak-kakak saya tersayang serta suami saya Eko Wahyu Prasetyo, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, bimbingan, dan doa-doa serta dukungan moral dan materil yang tiada henti diberikan kepada penulis selama ini.
10. Teman-teman terdekat saya Fira, Trisca, Uti, Aida yang telah berbagi banyak pengalaman suka dan duka serta berjuang bersama sejak awal masa perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat terbaik saya Aisyah, Helvi, Yuni, Bella, Rika, Cyntia, yang telah membantu dan memberikan support dalam segala hal, serta selalu menemani, berbagi pengalaman, dan bersedia mendengarkan keluh kesah penulis selama ini.

12. Semua teman, rekan dan pihak yang tidak dapat disebutkan satu- persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hanya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga penyelesaian karya tulis ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Penulis juga menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, demi perbaikan kearah yang lebih baik penulis mengharapkan kritik, saran dan pendapat dari pembaca. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat dan berguna dikemudian hari.

Samarinda, 28 Agustus 2022

Penulis,

Rizky Maulianika

ABSTRAK

Rizky Maulianika. Penelitian ini berjudul **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong 2015-2021)**. Dibimbing oleh Prof._Dr. Hj. Sri Mintarti,M.Si dan Bapak Agus Iwan Kesuma, SE.,MA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap pajak pertambahan nilai. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diukur berdasarkan nilai Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Variabel inflasi yang digunakan adalah inflasi perubahan tahun ke tahun dinyatakan dalam persen. Pada penelitian ini populasi yang diambil adalah seluruh pendapatan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong. Dalam penelitian ini terdapat 2 Hipotesis yang akan di uji, dengan menggunakan teori ekonomi makro. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Penentuan sampel dilakukan dengan metode teknik sampling jenuh dimana keseluruhan populasi dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap pajak pertambahan nilai.

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, inflasi, pajak pertambahan nilai.

ABSTRACT

Rizky Maulianika. The title of this Effect of Economic Growth and Inflation on Value Added Tax Revenue (Study at the Tenggara Pratama Tax Service Office 2015-2021). Supervised by Mrs. Prof. Dr. Hj. Sri Mintarti, M. Si and Mr. Agus Iwan Kesuma, SE., MA. This study aims to analyze and examine the effect of economic growth and inflation on value added tax. Economic growth in this study is measured based on the value of Gross Domestic Product (GDP) at constant prices. The inflation variable used is the year-to-year change in inflation expressed in percent. In this study, the population taken is the entire value added tax revenue at the Tenggara Pratama Tax Service Office. In this study, there are 2 hypotheses that will be tested, using macroeconomic theory. The data used in this study is secondary data. The research method used is a quantitative method. Determination of the sample is done by using a saturated sampling technique where the entire population is used as a sample in the study. The results of this study indicate that economic growth and inflation have a significant effect on value added tax.

Keywords: *economic growth, inflation, value added tax.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN IDENTITAS PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Ekonomi Makro.....	8
2.1.2 Pajak.....	10
2.1.2.1 Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2.1.2.2 Jenis Pajak.....	11
2.1.3 Pajak Pertambahan Nilai	13
2.1.3.1 Ciri-Ciri Pajak Pertambahan Nilai	14
2.1.4 Objek, Subjek, dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai	14
2.1.4.1 Objek Pajak.....	14
2.1.4.2 Subjek Pajak.....	18
2.1.4.3 Tarif Pajak Pertambahan Nilai	19
2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi	19

2.1.5.1 Produk Dosmetik Regional Bruto	20
2.1.6 Inflasi	21
2.2 Penelitian Terdahulu	22
2.3 Kerangka Konsep	24
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	25
2.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.....	25
2.4.2 Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Difinsi Operasioal dan Pengukuran Variabel.....	27
3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	27
3.1.2 Inflasi	28
3.1.3 Pajak Pertambahan Nilai	29
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	30
3.2.1 Populasi	30
3.2.2 Sampel.....	30
3.3 Jenis Data dan Sumber Data	31
3.3.1 Jenis Data	31
3.3.2 Sumber Data	31
3.4 Metode Analisis Data.....	31
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif	31
3.4.2 Uji Asumsi Klasik	32
3.4.2.1 Uji Normalitas	32
3.4.2.2 Uji Multikolonieritas	32
3.4.2.3 Uji Heteroskedastistitas	33
3.4.2.4 Uji Autokorelasi	33
3.4.3 Uji Kelayakan Model	34
3.4.3.1 Uji Signifikan Simultan (Uji F)	34

3.4.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	34
3.4.4 Analisis Regresi Linier Berganda	35
3.4.5 Pengujian Hipotesis (Uji t)	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian	37
4.2 Hasil Penelitian	37
4.2.1 Analisis Statistik Deskripsi	37
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	38
4.2.2.1 Uji Normalitas	38
4.2.2.2 Uji Multikolonieritas	39
4.2.2.3 Uji Heteroskedastistas	40
4.2.2.4 Uji Autokolerasi	41
4.2.3 Uji Kelayakan Model	42
4.2.3.1 Uji F	42
4.2.3.2 Koefisien Determinasi.....	42
4.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	43
4.2.5 Pengujian Hipotesis	44
4.2.5.1 Uji Signifikansi (Uji t)	44
4.3 Pembahasan.....	46
4.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	46
4.3.2 Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	47
BAB V PENUTUP	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	54

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4.1 . Hasil Uji Statistik Deskripsi.....	38
Tabel 4.2. Hasil Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov	39
Tabel 4.3. Hasil Uji Multikolinieritas	40
Tabel 4.4. Hasil Uji Autokorelasi	41
Tabel 4.5 Hasil Uji F.....	42
Tabel 4.6. Hasil Koefisien Determinasi	43
Tabel 4.7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	43
Tabel 4.8. Hasil Uji t.....	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Konseptual	24
Gambar 2.2. Model Penelitian	26
Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas.....	39
Gambar 4.2. Hasil Uji Heteroskedastitas.....	41

DAFTAR SINGKATAN

PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PKP	Pengusahan Kena Pajak
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
Kanwil	Kantor Wilayah
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
PDRB	Produk Dosmetik Regional Bruto
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PDB	Produk Dosmetik Bruto
BKP	Barang Kena Pajak
Non BKP	Barang Tidak Kena Pajak
JKP	Jasa Kena Pajak
PKP	Pengusahan Kena Pajak
UU	Undang- Undang
BPS	Badan Pusat Statistik
IHK	Indeks Harga Konsumen
IHKB	Indek Harga Perdagangan Bebas
TOL	Nilai Tolerance
VIF	Variance Inflation Factor
DW	Durbin Watson

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendanaan negara yang terbesar salah satunya yaitu dari sektor pajak. Selain untuk mendanai pembangunan, pajak menjadi salah satu harapan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Peraturan Pajak, pajak secara resmi ialah sumbangan yang patut dipenuhi untuk Negara, yang dibayar oleh orang pribadi atau badan terutang yang didasari oleh Undang-Undang, dengan tidak memperoleh keuntungan secara langsung dan dipergunakan untuk kebutuhan daerah bagi sebenarnya kemakmuran rakyat". UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pajak Pertambahan Nilai ialah pajak dari mengkonsumsi barang dan jasa di dalam Daerah yang dikenakan berlapis di setiap alur produksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah tarif yang diwajibkan atas kegiatan jual-beli barang dan jasa atas telah terjadinya oleh orang pribadi atau badan yang telah menjadi Wajib Pajak dan telah selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur) menunjukan jika Pajak Pertambahan Nilai di 2015-2021 adalah penyumbang terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan.

Dilansir dari Asmara (2018) terdapat 15 kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang mencapai 100% sasaran penerimaan pajak dari 352 KPP yang terpencair di wilayah Indonesia, salah satu dari 15 KPP tersebut ialah KPP tenggarong. Liony (2016) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kaltim dan Kaltara, kabupaten Kukar memberi kontribusi besar bagi penerimaan pajak di KPP Tenggarong dikarenakan banyak perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar sebanyak 1.364 Perusahaan, yang menjadikan factor yang cukup bisa diandalkan untuk penerimaan pajak di KPP Tenggarong. Berdasarkan pengertian PPN diatas ditarik kesimpulan bahwa PPN berkenaan langsung atas transaksi barang dan atau jasa, dimana setiap transaksi mengandung nilai-nilai ekonomi makro. Menurut Hasyim, (2016) pengertian ekonomi makro ialah bidang yang menelaah karakter perekonomian berdasarkan keutuhan atau secara agregat. Ekonomi makro menjelaskan pemusatan pada perilaku serta strategi ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi-kondisi dan merupakan subjek yang penting dikarenakan menyentuh semua aspek kehidupan dan kepentingan masyarakat umum.

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba meneliti mengenai pengaruh variable Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap penerimaan PPN. Penelitian Rahmawati, (2013) menunjukan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada penerimaan PPN dan Inflasi tidak berpengaruh pada Penerimaan PPN. Nasrulloh, (2015) menunjukan jika pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Apriyanthi, (2017) menunjukan hasil

bahwa inflasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terlihat bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh pada penerimaan PPN, tetapi ada penelitian lain menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh pada penerimaan PPN.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu periode waktu penelitian. Pemilihan tahun pada penelitian ini menggunakan data tahun 2015-2021. Perbedaan lainnya terdapat pada sampel yang digunakan, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data pada objek yang berada di Ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Tenggarong.

Berdasarkan buku Nota Keuangan (2017) edisi dua upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan PPN adalah mendorong ekonomi makro dalam konsumsi dan daya beli masyarakat, selain itu, hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN. Meningkatnya pengeluaran konsumsi secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan PPN.

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB daerah Kutai Kartanegara tumbuh berfluktuatif selama tahun 2015 – 2021, pendapat ini juga sama dengan pendapat yang disampaikan melalui webset resmi kukar dengan judul (Kukar Penyumbang Terbesar Perekonomian Kaltim Capai Rp162 Triliun Kukarpaper.com, 2021) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Kutai Kartanegara selama tahun 2012-2019

bergerak cukup fluktuatif, selain itu dibandingkan dengan lima Kabupaten/ Kota Provinsi Kaltim, Kutai Kartanegara merupakan penyumbang terbesar perekonomian Provinsi Kaltim yakni senilai Rp 162,74 Triliun. Pertumbuhan ekonomi kukar selama dua tahun pertama mengalami penurunan, dan pada tahun 2017- 2019 pertumbuhan ekonomi kukar mengalami pertumbuhan yang baik tetapi sayangnya ditahun 2020 pertumbuhan kukar kembali mengalami penurunan yang cukup besar yaitu -4.21 % penurunan pertumbuhan ini diakibatkan karena penurunan kinerja yang cukup signifikan, berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur 2022. menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab turunnya kinerja ekonomi adalah adanya kebijakan pemerintah yang membatasi mobilitas masyarakat, sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pembatasan mobilitas tersebut menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Selain itu, dari sisi eksternal ekonomi wilayah Kalimantan Timur, khususnya pasar global, terdapat penurunan demand terhadap komoditas energi, yang dihasilkan di wilayah Kalimantan Timur seperti migas dan batubara dimana kabupaten kukar ialah bagian yang besar yang mempengaruhi sektor migas dan batubara dan kemudian diikuti penurunan harga komoditas energi tersebut di pasar internasional. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDB telah meningkatkan penerimaan PPh maupun PPN dengan hasil yang lebih besar. Herman,(2007) Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan penerimaan PPN

adalah positif. Artinya memiliki hubungan yang tinggi dengan penerimaan PPN (Nasrulloh, 2019).

Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai salah satu indikator yang memiliki peranan penting untuk mengetahui keadaan pertumbuhan ekonomi Menurut (Sukirno, 2000) “PDB (*Gross Domestic Product GDP*) adalah harga dan jasa satu Negara yang dibuat pada satu periode tertentu.

Inflasi ditafsirkan atas kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi terjadi oleh mekanisme permintaan dan penawaran dalam pasar atau kombinasi keduanya. Jika terjadi peningkatan inflasi, maka spontan akan meningkatkan harga jual, yang menjadi dasar pengenaan pajak (DPP), Meningkatnya DPP PPN ini yang berdampak mempengaruhi terhadap penerimaan PPN.

Bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tumbuh fluktuatif. Inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara 2015- 2021 memiliki skema grafik yang hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi. Tahun 2015 inflasi cukup mengalami angka yang mengawatirkan yaitu -12.60% jauh dari target Bank Indonesia telah tentukan atau targetkan. 2016-2018 inflasi mengalami mengalami kenaikan dan kembali menurun pada 2019-2020. Inflasi mempunyai dampak positif atas perolehan Pajak Pertambahan Nilai (Kaniskha, Almira & Herna,2016). Variable inflasi berdampak signifikan atas penerimaan PPN (Salawati, 2008).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, hingga memperoleh rumusan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong 2015- 2021 ?
2. Apakah inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong 2015- 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong 2015- 2021.
2. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong 2015- 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian atau riset tentu memiliki berbagai manfaat, pada penelitian/riset ini juga mengandung beberapa manfaat diantaranya ialah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran ataupun teori terhadap penelitian selanjutnya yang sesuai dengan yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu akuntansi khususnya perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

b. Bagi KPP Pratama Tenggarong, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai bahan masukan untuk hal-hal yang menyangkut tentang penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

c. Bagi Akademisi, diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat sebagai bahan referensi antara teori yang didapat dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dan sumbangan pemikiran untuk pihak lain atau pembaca yang memerlukan untuk dikembangkan lebih luas dan mendalam.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Ekonomi Makro

Ekonomi makro ialah bidang ekonomi yang menelaah aktivitas ekonomi berdasarkan keseluruhan. yang dicakup lain lagi elemen-elemen berdasarkan perekonomian atau sekedar perusahaan saja, namun sudah membicarakan kegiatan ekonomi berdasarkan keutuhan dalam perekonomian (Hasyim, 2016).

Masalah makro ekonomi yang dihadapi menurut Sukirno, (2013) adalah Pengangguran, Inflasi, Pertumbuhan ekonomi, tidak seimbang nya neraca perdagangan dan pembayaran. Teori ini menafsirkan bahwa kecondongan terhadap ekonomi makro mempunyai akibat atas tingkah laku individu ekonomi makro. Perekonomi suatu negara di sebabkan permintaan dan penawaran yang berjalan secara beriringan, sama halnya dengan PPN, terjadi atas konsumsi masyarakat, semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat maka penerimaan PPN semakin meningkat (Kaniskha, Almira & Herna, 2016).

Akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an dan penghujung akhir abad ke - 20 tepatnya tahun 1980-an perekonomian menghadapi situasi tingkat pengangguran yang besar, pertumbuhan ekonomi yang berjalan lamban, defisit

neraca pembayaran internasional serta inflasi yang tinggi. Indonesia menghadapi tingkat inflasi teramat parah pada tahun 1966 dengan peningkatan hingga 600% selama satu tahun (Suparmoko & Sofilda, 2014). Lalu tahun 1980-an transformasi berjalan sedikit. Tahun 1990-an tingkat inflasi menurun sekitar 10% dan kembali meninggi memenuhi 80% per tahun pada 1998. Perkiraan pada seputar tahun 1982 Indonesia mengalami laju perkembangan yang lemah. Saat itu industri minyak terlampaui lesuh, diimbangi krisis moneter dan krisis ekonomi tahun 1997-1998 perekonomian Indonesia menurun sekitar 14%, tahun 2000 hingga 2009 pertumbuhan Indonesia mulai membaik dengan sasaran tumbuh 6%. Walau faktanya hingga tahun 2019 hanya mampu mencapai sekitar 5,3%.

Berdasarkan permasalahan tersebut bisa dilihat secara luas lingkup bahwa pertama ekonomi makro lebih menganalisis dengan cara melihat dari sisi permintaan dan penawaran yang mampu mempengaruhi tingkat aktivitas suatu perekonomian. Kedua, makro ekonomi menelaah permasalahan-permasalahan yang ada di setiap perekonomian. Terakhir, makro ekonomi menilai bagaimana andil serta campur tangan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ekonomi yang terjadi tersebut. Teori ekonomi berusaha menerangkan mengapa berbagai masalah muncul dalam perekonomian dan bagaimana masalah-masalah tersebut terselesaikan.

2.1.2 Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Peraturan Pajak tentang perpajakan, dinyatakan jika pajak ialah sumbangan yang harus dipenuhi kepada Negara, oleh orang pribadi atau badan berkarakter wajib yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan yang memiliki karakter memaksa atas dasar Undang-Undang, serta tidak memperoleh keuntungan secara langsung untuk individu, dan dipergunakan untuk keperluan Negara bagi sebenar-benarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pajak adalah pemberian yang wajib dilakukan untuk yang terhutang dari wajib pajak pribadi atau badan yang memiliki karakter mengharuskan dan berlandaskan Undang- Undang, serta tidak memperoleh keuntungan secara langsung dan dipergunakan atas kebutuhan daerah bagi sebenar-benarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro Rochmat, (2014) menyatakan definisi pajak adalah sumbangan rakyat kepada simpanan Negara berlandaskan peraturan Undang-Undang (mampu didesak) serta tidak memperoleh balasan spontan namun ditunjukan pada pembayaran untuk keperluan publik.

2.1.2.1 Sistem Pemugutan Pajak

Lazarus, (2020) menyatakan bahwa system pemugutan pajak memiliki tiga cara, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Ialah suatu metode yang diberikan kepada pemerintah untuk membuat kalkulasi besaran total nilai pajak yang wajib di bayar oleh wajib pajak. Ciri-cirinya (1) hak untuk menetapkan jumlah nilai pajak terhutang pada fiskus (2) wajib pajak bersifat pasif (3) utang pajak terjadi selepas dikeluarkannya surat keputusan pajak.

b. *Self Assessment system*

Adalah metode pengumpulan pajak yang memperuntukan wewenang pajak langsung kepada wajib pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya (1) hak untuk menetapkan jumlah nilai pajak terhutang oleh wajib pajak sendiri (2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menjumlah, menyetor serta memberitahukan secara pribadi atas pajak yang terutang (3) fiskus hanya sekedar memantau.

c. *With Holding System*

Ialah metode pengenaan pajak yang menetapkan kewenangan pada bagian orang ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersinggungan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya, berhak atas jumlah nilai pajak yang tertanggungkan ada disisi pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.2.2 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi berdasarkan situs onlen pajak.

a. Jenis Pajak Menurut Golongan:

1. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipertanggung jawabkan secara individu yang memiliki sifat Wajib Pajak dan tidak bisa diberikan atau membebankan pada orang lain. Pajak merupakan keharusan yang benar-benar harus dibayar Wajib Pajak yang berkaitan.

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang dapat diwakilkan atau alihkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung dikarenakan adanya suatu aktivitas, kejadian, atau tindakan yang menghasilkan terhutangnya pajak, perumpamaan adanya kegiatan pemberian barang atau jasa.

b. Jenis Pajak Menurut sifat:

1. Pajak Subjektif

Pajak yang berdasarkan melihat situasi individu Wajib Pajak atau penghitungan pajak yang memperhatikan subjeknya.

2. Pajak Objektif

Pajak yang dikenakan dengan melihat sarannya baik bersifat benda, kondisi, tindakan, atau kejadian yang memicu munculnya keharusan melunasi pajak yang terutang, tanpa melihat situasi individu subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

c. Jenis Pajak berdasarkan Lembaga Pemungut

1. Pajak Negara (Pajak pusat)

Pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk mendukung pembiayaan kebutuhan pokok negara secara umum.

2. Pajak Daerah

Pajak yang ditarik oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan dipergunakan untuk pembiayaan umum daerah masing-masing.

2.1.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pertama kali diberlakukan di Indonesia yaitu pada 1 April 1985, menggantikan Pajak Penjualan (PPn). Undang-Undang No. 42 2009 tentang dasar hukum PPN memiliki beberapa nilai (1) dapat meningkatkan kapasitas hukum dan keadilan yang bersentuhan pada Pajak Pertambahan Nilai. (2) menyederhanakan system Pajak Pertambahan Nilai. (3) mengurangi biaya kepatuhan. (4) meningkatkan nilai kewajiban bagi wajib pajak. Menurut Literatur Salam, (2017) Pajak Pertambahan Nilai ialah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di dalam daerah Pabean atau atas impor BKP. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggambarkan pajak yang didasari oleh harga tambahan pada barang dan jasa saat proses transaksi (Puspitha & Supadmi, 2018) .

Berdasarkan definisi-definisi tersebut bisa dilihat dasar pengenaan PPN ialah mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat atas konsumsi.

2.1.3.1 Ciri-Ciri Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut situs resmi pajak, Online Pajak, (2016) terdapat tujuh kekhususan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), antara lain (1) berupa pajak tidak langsung (2) merupakan pungutan yang sifatnya objektif (3) multi stage tax (4) dihitung dengan metode indirect subtraction (5) merupakan pajak atas konsumsi umum dalam negeri (6) bersifat netral (7) tidak menimbulkan pajak berganda. Menurut (Waluyo,2000) pajak yang menyentuh berdasarkan aktivitas ekonomi, Pajak Pertambahan Nilai memiliki beberapa karakteristik (1) PPN merupakan Pajak Tidak Langsung, (2) PPN merupakan pajak objektif, (3) *Multi-stage tax* (4) Non-Kumulatif, (5) *Single tariff* (Tarif tunggal), (6) *Credit Method/ Indirect method/ indirect subtraction method*, (7) Pajak atas konsumsi dalam negeri, (8) *consumtion type value added tax*.

2.1.4 Objek Subjek dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai

2.1.4.1 Objek Pajak

Berdasarkan Salam, (2017) Pajak Pertambahan Nilai didasarkan pada :

- 1) Pengenaan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam wilayah Pabean yang dibuat oleh pengusaha. Ketentuan sebagai berikut :
 - Barang berwujud yang diberikan jenis BKP
 - Barang tidak berwujud yang diberikan ialah jenis BKP tidak berwujud

- Pemberian dilaksanakan dalam wilayah pabean.
- Pemberian dilaksanakan pada situasi Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya

2) Impor Barang Kena Pajak

3) Jasa Kena Pajak (JKP) pada wilayah yang dapat dilaksanakan oleh pengusaha.

Ketentuannya ialah:

- Jasa yang diberikan adalah JKP
 - Pemberian dilaksanakan di wilayah pabean
 - Pemberian dilaksanakan pada situasi aktivitas usaha atau pekerjaannya
- 4) Penggunaan BKP tidak berwujud dari luar wilayah pabean
 - 5) Penggunaan JKP yang berasal diluar wilayah pabean
 - 6) Pengeriman BKP keluar negeri yang memiliki wujud oleh PKP

A. Barang Kena Pajak (BKP)

Barang Kena Pajak ialah barang yang menurut sifat atau hukumnya dapat berbentuk barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud yang termasuk dalam katagori pajak berdasarkan Undang-Undang PPN (Lazarus, 2020)

B. Barang Tidak Kena Pajak (Non BKP)

Ketentuan umumnya semua barang dapat dijadikan objek PPN Kecuali Undang-Undang memutuskan kebalikannya. Dalam pasal 4A ayat (2) Perubahan Ketiga UU

PPN 1984, katagori barang yang bukan objek penganan PPN merupakan memiliki bagian sebagai berikut:

a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang dijangkau tepat dari sumbernya seperti minyak mentah (crude oil), gas bumi (tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat), panas bumi, asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonite, dolomit, felspar, (feldspar), garam batu (halite), garfit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir, dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolite, basal, dan trakkit, batu bara sebelum diproses menjadi brikat batu bara, dan bijah besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, biji nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

b. barang kebutuhan pokok yang utama dibutuhkan oleh rakyat banyak seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam (baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium), daging (daging segar yang diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, potong, dinginkan, bekukan, dibungkus atau tidak, diasinkan, dikapur, diasamkan, diawetkan, dengan cara lain, dan/ atau direbus) , telur (telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas), susu (susu perah yang telah melewati tahap pendinginan maupun dipanaskan, serta tidak menambahkan penyedap rasa, buah-buahan (buah-buahan yang dipetik, yang sudah melewati sortir, kupas, cuci, dipotong, diiris,

di-grading, dan/atau dikesmas atau tidak dikemas), dan sayur-sayuran (sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/ atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah)

c. makanan serta berbagai minuman yang disediakan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, baik yang dimakan langsung di lokasi ataupun tidak, terliput konsumsi yang dibuat oleh pembisnis makanan (cetring)

d. Uang, emas batangan, dan surat berharga (saham, obligasi)

C. Jasa Kena Pajak (JKP)

Menurut literature Lazarus,(2020) Jasa Kena Pajak (JKP) ialah setiap kegiatan pelayan berlandaskan suatu perbuatan hukum yang berdampak pada barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk digunakan, termasuk jasa yang tindakannya menghasilkan barang kerana pesanan atau permintaan memakai bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

D. Jasa Tidak Kena Pajak (Non JKP)

Pasal 4A ayat (3) UU PPN dan PPnBM telah menetapkan beberapa kelompok jasa yang tidak dikenai PPN yaitu (1) jasa Kesehatan (2) jasa dibidang pelayanan social, (3) jasa pengiriman surat dengan perangko, (4) jasa keuangan, (5) jasa asuransi, (6) jasa dibidang ke agamaan, (7) jasa dibidang Pendidikan, (8) jasa penyiaran tidak bersifat iklan, (8) jasa kendaran umum di darat dan di air, (9) jasa

dibidang tenaga kerja, (10) jasa dibidang perhotelan, (11) jasa yang disiapkan Pemerintah dalam rangka melakukan kegiatan pemerintahan secara umum, (12) jasa penyediaan tempat parkir, (13) telepon umum mempergunakan uang logam, (14) jasa pengiriman dengan wesel pos.

2.1.4.2 Subjek Pajak

Berdasarkan literatur Nurmantu,(2005) Subjek Pajak dalam Pajak Pertambahan Nilai terdiri atas :

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah perusahaan yang melaksanakan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang ditarik atas dasar pajak Undang-Undang PPN dan buka perusahaan kecil.
- b. Perusahaan kecil yang memilih untuk dikukuhkan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari RP600.000.000,00 Setahun.
- c. Individu atau badan menggunakan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar wilayah Pabean.
- d. individu atau badan yang sedang membangun tempat tinggal sendiri atas ketentuan yang terpilih.
- e. Pemungutan pajak yang ditunjuk oleh pemerintah, terdiri atas kantor Pembendaharaan Negara, Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Bendahara Proyek.

2.1.4.3 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif PPN menurut Pasal 7 Undang- Undang No. 42 Tahun 2009 adalah :

a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%

Tarif 10% dikenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam daerah pabean/ impor BKP/ pemberian JKP di wilayah pabean/ penggunaan BKP tidak berwujud dari luar wilayah pabean di dalam wilayah pabean/ penggunaan JKP dari luar wilayah pabean di dalam wilayah pabean.

b. Tarif Pajak Pertambahn Nilai (PPN) 0%

Tarif 0% dikenakan atas ekspor BKP berwujud/ ekspor BKP tidak berwujud/ ekspor jasa kena pajak. Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian pajak yang telah disetor untuk pendapatan barang kena pajak dan/ atau jasa kena pajak yang bersangkutan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada saat ini menjadi masalah makro ekonomi jangka Panjang. Di setiap periode sesuatu masyarakat akan menambah kemampuannya, dan suatu kondisi di mana terjadinya perkembangan Produk Dosmetik Bruto (PDB) yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat (Nasrulloh, 2019).

Menurut literatur Sukirno,(2013) “pertumbuhan ekonomi merupakan permasalahan makro ekonomi jangka Panjang, di setiap waktu masyarakat bakal memperoleh atau mengupgride pengetahuan”.

Sagir,(2009) “pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan pendapatan nasional” Dari definis pertumbuhan ekonomi berikut bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan masalah makro ekonomi yang mempengaruhi perubahan pendapatan nasional dimana setiap periode masyarakat akan menambah kemampuannya.

2.1.5.1 Produk Regional Bruto (PDRB)

Adanya ketidakseimbangan ekonomi di lingkungan masyarakat sehingga bagian wilayah (spatial inequality) mengakibatkan para ekonom memunculkan kajian ekonomi wilayah (Nur,2019) Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukan dengan tingginya nilai PDRB menunjukan jika wilayah terbilang menghadapi peningkatan dalam perekonomian (Iqraam & Sudibia, 2019). Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan PDRB selaku nilai lebih yang mewujudkan hasil oleh semua bagian usaha dalam wilayah, maupun melambangkan besaran nilai barang dan jasa akhir yang diakibatkan oleh seluruh wilayah atau melambangkan besaran nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

2.1.6 Inflasi

Teori Ekonomi makro menjelaskan inflasi terjadi akibat masyarakat hidup diluar kapasitas ekonominya dan mengakibatkan permintaan yang lebih besar. Utari, (2016), Inflasi adalah indikator makro ekonomi yang amat besar karena memengaruhi nilai uang sampai akibatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Bahkan Presiden Gerald Ford dari USA pernah menyatakan “*Inflation is the number one public enemy*”, atau “Inflasi adalah musuh masyarakat yang utama. Kuncoro,(2014) menyatakan definisi inflasi ialah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara normal dan terus menerus. Terjadinya inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan (Astuti, 2015).

Kuncoro,(2014) menyatakan Indikator yang sering dipergunakan untuk menghitung tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks ini merupakan suatu indikator harga yang selama ini dipergunakan untuk melihat kesuksesan kebijakan moneter dalam menangani inflasi, karena indikator ini dapat tersedia lebih cepat di banding dengan indikator harga lainnya, seperti Indek Harga Perdagangan Bebas (IHKB) dan PDB deflator.

penelitian dengan variable-varibel terkait pad penelitian ini, yakni variable utama Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan pertumbuhan ekonomi (X1), dan Inflasi (X2) terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggara (Y). Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Salawati (2008)	Analisis Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupia Terhadap Penerimaan PPN pada Kanwil DJP Jakarta Selatan.	Inflasi berdampak secara signifikan terhadap Penerimaan PPN sehingga hipotesis diterima. Nilai tukar rupiah berdampak secara signifikan terhadap penerimaan PPN sehingga hipotesis diterima.
2	Asrul Hidayat, Tubagus Chairul Amachi (2013)	Analisis Penerimaan Pajak dengan Pendekatan Produk Dosmetik Bruto Sektoral.	Menggunakan teori analisis Cost dan benefit penghindaran pajak, kondisi yang ada saat ini memberikan benefit penghindaran pajak lebih besar dari pada cost-nya.
3	Encep Herdian, Rachman Nalendra (2013)	Pengaruh Produk Dosmetik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak (Survei pada Provinsi Jawa barat Periode 2008-2012)	Produk Dosmetik Bruto berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pusat. Tingkat Inflasi berpengaruh negative terhadap penerimaan pajak.
4	Siestri Pristina Kairupun (2013)	Produk Dosmeti Regional Bruto (PDRB), Inflasi dan Belanja Daerah Pengaruh Terhadap Kesempatan Kerja di Sulawesi Utara.	Variasi dari perubahan PDRB, tingkat inflasi dan belanja daerah sangat kuat mempengaruhi perubahan kerja. Belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja.
5	Himawan Yudistirdama, Agnes L Ch Lapijan, Jacline L. Sumual (2016)	Pengaruh Produk Dosmetik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh negative dan signifikan untuk tingkat Kemiskinan di Kota Manado	Pengaruh Produk Dosmetik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh negative dan signifikan untuk tingkat Kemiskinan di Kota Manado.
6	Nazar Nasrulloh (2016)	Pengaruh Jumlah Pengusaha Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Arah hubungan positif Pengusaha Kena Pajak meningkat maka Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akan meningkat pula. Arah hubungan positif menggambarkan bahwa ketika Pertumbuhan Ekonomi meningkat maka Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akan meningkat

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1. Tabel Sambungan

7	Almira Herna Renata, Kadarisman Hidayat, Bayu Kaniskha (2016)	Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.	Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN secara positif dan signifikan. Nilai tukar berpengaruh terhadap penerimaan PPN secara negatif dan signifikan. Jumlah PKP berpengaruh terhadap penerimaan PPN secara positif dan signifikan.
8	Mas'udin (2017)	Dinamika Perubahan Ekonomi Makro Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan Non Migas	Hasil uji kausalitas Granger menunjukkan terdapat hubungan satu arah antara pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah dan PPh non migas. Variabel tersebut secara signifikan mempengaruhi PPh non migas, sebaliknya PPh non migas tidak memengaruhi variabel-variabel ekonomi makro tersebut.
9	Nadya Praciastuti (2018)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Jawa Tengah Tahun 2011-2015.	pertumbuhan ekonomi (PE) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, inflasi (INF) memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap PPN dan jumlah pengusaha kena pajak (PKP) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN
10	Wahyu Sigit Sanyoto (2018)	Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia Periode 1972-2017.	inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Nilai tukar berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Neraca perdagangan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak
11	Putu Vilia Puspitha dan Ni Luh Supadmi (2018)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pada Penerimaan PPN (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Se-Bali)	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada penerimaan PPN. Artinya apabila pertumbuhan ekonomi di Bali meningkat maka penerimaan PPN juga akan meningkat. Inflasi tidak berpengaruh pada penerimaan PPN. Artinya jika terjadi inflasi mengakibatkan kuantitas barang yang dihasilkan menurun tetapi harga barang meningkat.

Disambung ke halaman berikutnya

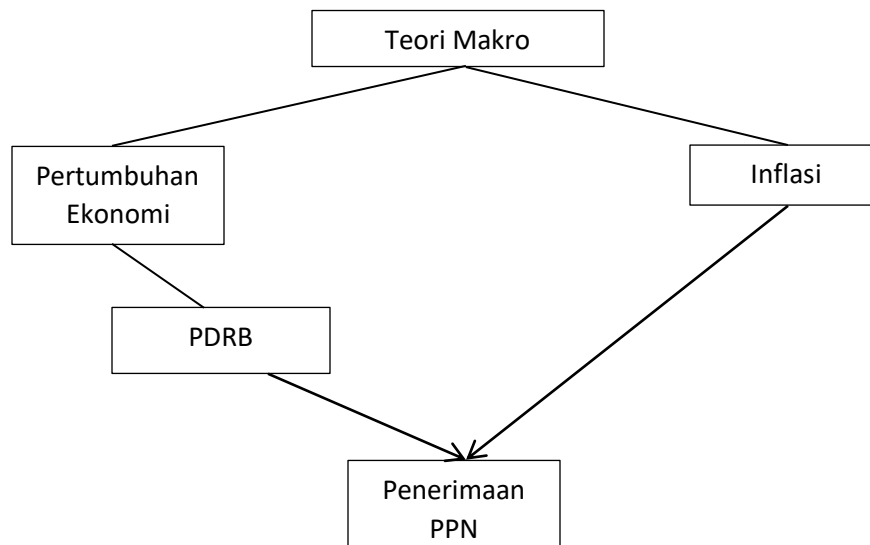
Tabel 2.1. Tabel Sambungan

12	Siestra Pristina Kairupun (2019)	Produk Dosmetik Regional Bruto (PDRB), Inflasi Dan Belanja Daerah Pengaruhnya Terhadap Kesempatan Kerja Di Sulawesi Utara Tahun 2000-2012	secara bersama variabel PDRB, tingkat inflasi dan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja. Variasi dari perubahan PDRB, tingkat inflasi dan belanja daerah sangat kuat mempengaruhi perubahan kesempatan kerja. PDRB memiliki pengaruh negative dan signifikan dalam mendapatkan kerja. Tingkat inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesempatan kerja. Dan belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan Kerja.
----	----------------------------------	---	--

Sumber: Hasil review beberapa jurnal, 2022

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori yang telah diuraikan, maka variable yang dipakai dalam penelitian ini ialah pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Maka kerangkan penelitian dapat digambarkan pada gambar berikut ini :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber: Diolah oleh Penulis

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

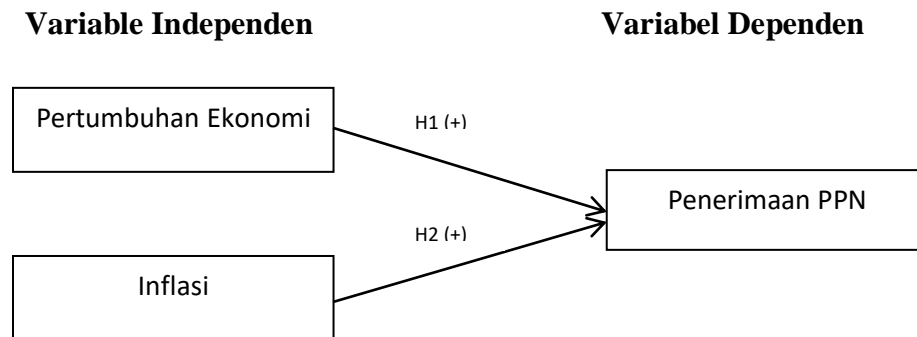
Teori ekonomi makro menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi ialah salah satu sumber permasalahan dalam bidang ekonomi makro, dimana pertumbuhan ekonomi yang meningkat dapat mempengaruhi nilai penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang didapat berdasarkan objek PPN. Dengan adanya Pertumbuhan ekonomi maka output atau kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah. Di samping itu kesejahteraan masyarakat juga akan bertambah karena pembangunan ekonomi telah dapat menambah kesempatan bagi masyarakat mengadakan pilihan yang lebih luas (Hasan & Azis,2018). Penelitian yang dilakukan Puspitha & Supadmi,(2018) mengatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi yang baik dan terus meningkat akan memberikan kontribusi pada penerimaan PPN karena pertumbuhan ekonomi yang baik akan menjamin terus terjadinya konsumsi barang dan jasa kena pajak di masyarakat. Nasrulloh,(2019) membuktikan jika pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Berdasarkan penjelasan penelitian terdahulu bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada peningkatan penerimaan PPN, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut.

H1: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.4.2 Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Teori ekonomi makro menjelaskan inflasi terjadi karena masyarakat hidup diluar batas kemampuan ekonominya dan mengakibatkan permintaan yang lebih besar. Permintaan untuk barang dan jasa oleh masyarakat sangat beragam harganya, maka tingkat inflasi akan mempengaruhi harga jual barang dan atau jasa tersebut dimana harga jual barang dan jasa merupakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN (Nuryani, 2016). Semakin tinggi inflasi maka pengenaan DPP atas konsumsi barang dan jasa akan meningkat dan berpengaruh pada meningkatnya penerimaan PPN (Puspita, Supadmi, 2018). Permintaan masyarakat yang besar akan mempengaruhi harga jual barang dan atau jasa dimana harga jual tersebut sebagai landasan pengenaan pajak yang menjadi sumber penerimaan PPN. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya maka dimunculkan hipotesis kedua, yaitu :

H2: Inflasi berpengaruh positif signifikan pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai



Gambar 2.2 Model Penelitian

Sumber: Diolah Oleh Penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi sebagai variabel independen, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) variabel dependen.

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan sebagai pertumbuhan rutinitas dalam perekonomian yang membuat barang dan jasa yang didistribusikan kepada masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diukur berdasarkan nilai Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam terutama minyak bumi dan gas alam (migas) serta batubara sehingga perekonomian Kutai Kartanegara masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang mencapai lebih dari 77%. Sektor pertanian dan kehutanan hanya memberikan kontribusi sekitar 11%, sedangkan sisanya disumbangkan dari sektor perdagangan dan hotel, yakni kurang lebih 3%, industri pengolahan sekitar 2,5%, bangunan 3%, keuangan 1% dan sektor lainnya sekitar 2% (Pertumbuhan Ekonomi Kutai Kartanegara, 2022). Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim dengan meakses www.kaltim.bps.go.id

berupa data PDRB tahunan periode 2015 – 2021. Data pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan menggunakan PDRB atas harga Konstan tahun (Puspitha & Supadmi, 2018)

$$PE = \frac{PDRBt - PDRBt-1}{PDRBt-1} \times 100 \%$$

Keterangan:

PDRBt = PDRB tahun tertentu

PDRBt-1 = PDRB tahun sebelumnya

Data PDRB yang tersedia adalah data tahunan, dalam bentuk persen.

3.1.2 Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga pada jasa dan atau barang secara terus menerus secara menyeluruh dalam jangka waktu tertentu. inflasi sebagai suatu fenomena perekonomian yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik akuisisi permintaan, penawaran maupun ekspektasi dari pelaku bisnis usaha, sehingga inflasi sangat berpengaruh secara langsung pertumbuhan ekonomi di suatu daerah termasuk di Kukar (Ekonomi dan Parawisata, 2022), Inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara 2015- 2021 memiliki sekema grafik yang fluktuatif. 2015 inflasi kukar cukup mengalami angka yang mengawatirkan yaitu -12.60% jauh dari target Bank Indonesia telah tentukan atau targetkan. Variabel inflasi yang digunakan adalah inflasi perubahan tahun ke tahun 2015 – 2021 yang dinyatakan

dalam persen. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik di Kaltim dengan meakses Badan Pusat Stastitik Provinsi Kalimantan Timur,(2018). Pengukuran inflasi diukur berdasarkan tingkat harga IHK (Puspitha & Supadmi, 2018), dengan rumus:

$$\pi = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

π : tingkat inflasi (tahun t)

IHK_t : Tingkat harga IHK ada tahun t

IHK_{t-1} : Tingkat harga IHK pada tahun sebelumnya

3.1.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak konsumsi barang dan atau jasa di daerah pabean yang diperkenakan dengan berlapis pada tahapan jalur produksi dan distribusi. Dilansir dari Asmara (2018) terdapat 15 kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang mencapai 100% sasaran penerimaan pajak dari 352 KPP yang terpencar di wilayah Indonesia, salah satu dari 15 KPP tersebut ialah KPP tenggarong. Liony (2016) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kaltim dan Kaltara, kabupaten Kukar memberi kontribusi besar bagi penerimaan pajak di KPP Tenggarong dikarenakan banyak perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar sebanyak 1.364 Perusahaan, yang menjadikan factor yang cukup bisa diandalkan

untuk penerimaan pajak di KPP Tenggarong. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di wilayah KPP Pratama Tenggarong. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penerimaan per tahun dari PPN yang terhutang dihitung dengan cara mencari jumlah dari nilai PPN yang terutang (Puspitha & Supadmi, 2018), dengan tahapan :

PPN yang terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi

Populasi ialah kumpulan individu yang sejenis atas waktu serta tempat terbatas pada waktu dan tempat tertentu dan karakteristiknya hendak di teliti. Pada penelitian ini populasi yang diambil adalah pendapatan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong pada tahun 2015 - 2021.

3.2.2 Sampel

Cara mengambil sampel yang dipergunakan yaitu teknik sampling jenuh dimana keseluruhan populasi dijadikan sebagai sampel dalam penelitian (Sugiyono,2009) dan pada penelitian ini sampel yang diambil adalah seluruh populasi yang ada yaitu menggunakan semua Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berada dalam KPP Pratama Tenggarong.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan dapat dihitung dengan satuan hitung (Sugiyono,2009) Data kuantitatif pada penelitian ini dengan data runtun waktu (time series) berupa data tahunan dari Januari 2015 – Desember 2021. Data yang digunakan diperoleh dari (Badan Pusat Stastiktik Provinsi Kalimantan Timur) berupa PDRB dan inflasi tahunan serta data penerimaan PPN tahunan pada KPP Pratama Tenggarong.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yakni data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah diolah yang diberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen (Sugiyono,2009). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa laporan PDRB dan inflasi perbulan diakses pada situs www.kaltim.bps.go.id serta jumlah penerimaan PPN seluruh KPP Pratama Tenggarong tahun 2015-2021.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan sebuah keterampilan statistik yang meringkas, mempertujukan dan menjelaskan data dalam bentuk yang sederhana sehingga dapat

dimengerti secara mudah dan dapat memberikan informasi tersebut lebih lengkap. Statistik deskriptif berfungsi untuk menjelaskan atau membantu untuk dapat memahami tentang objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan dependen mempunyai distribusi normal. Deteksi uji normalitas ditentukan dengan menggunakan grafik histogram dan normal probability plot.

Teknik yang digunakan dalam pengujian distribusi normalitas data penelitian ini ialah Teknik Kolmogorov-Smirnov. Jika tingkat signifikansi uji kenormalan distribusi lebih besar dari tingkat alpha (0,05), maka data terdistribusi normal, sebaliknya, jika signifikansi uji normalitas distribusi data lebih kecil dari alpha (0,05) maka data tidak berdistribusi normal.

3.4.2.2 Uji Multikolonieritas

Jika dua/lebih variabel independen pada model regresi memiliki hubungan linear erat, maka model regresi tergejala kondisi multikolinearitas. Kolerasi linier antara variabel independen sangat kuat jika nilai korelasi antara variabel independent ini lebih kuat dari hubungan variabel independent dengan dependen. Agar model regresi bebas dari gejala hubungan yang kuat antar sesama variabel independen, maka perlu dilakukan pengujian multikolinieritas.

Dengan melihat nilai Tolerance (TOL) dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai $VIF \leq 10$ dan $TOL \geq 0,1$ maka dapat dikatakan bebas multikolonieritas yang artinya tidak ada korelasi diantara variabel bebas.

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Gani & Amalia (2014:123) uji heteroskedastisitas adalah kondisi di mana varian dan nilai sisa adalah tidak sama antara satu observer dengan observer lainnya. Jika varian dan nilai sisa sama antara observer satu dan observer lainnya, ini disebut keadaan homoskedastisitas. Regresi baik ialah regresi yang berada pada proses homoskedastisitas dan bukan kondisi heteroskedastisitas.

Memperhatikan pola titik pada scatterplot, jika pola titik yang dihasilkan menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka terbebas dari gejala heteroskedastisitas, yang artinya tidak terjadi kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke yang lain.

3.4.2.4 Uji Autokorelasi

Menggunakan uji Durbin Watson (D-W) yang dimana menguji apakah dalam model regresi terjadi kesalahan pengganggu pada periode yang satu ke yang sebelumnya.

Untuk mendeteksi gejala pada autokorelasi ada beberapa cara yaitu uji statistik Q, Lanerage Multiplier, uji *Durbin Watson* (DW Test) dan Run Test. *Durbin watson* (DW) paling sering digunakan dalam beberapa uji autokorelasi. Karena menu pada

Uji DW yang tergolong default pada program SPSS maka uji ini sering digunakan, Model regresi baik yaitu yang tidak adanya masalah autokorelasi.

Pengambilan keputusan untuk uji Durbin Watson:

- a. Bila $DW < d_L$ maka ada autokorelasi positif atau $DW > 4 - d_L$ maka ada autokorelasi negatif.
- b. Bila $d_u < DW < 4 - d_u$ tidak terjadi autokorelasi
- c. $d_L < DW < d_U$ atau $4 - d_U < DW < 4 - d_L$ tidak dapat disimpulkan.

Nilai d_U dan d_L dapat diperoleh dari tabel statistik durbin watson. Jika nilai hitung DW tidak berada pada rentang nilai tabel Dw batas bawah dan batas atas maka nilai terdapat masalah autokorelasi.

3.4.3 Uji Kelayakan Model

3.4.3.1 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Untuk melihat apakah semua variabel independennya mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Dengan mengidentifikasi F hitung atas F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel maka terjadi pengaruh secara simultan. Model regresi dipandang layak jika hasil nilai F memiliki signifikansi dibawah tingkat alpha 0,05.

3.4.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Mengukur sejauh mana varaiabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Semakin mendekati 0 besar koefisien determinasi persamaan regresi, semakin kecil efek seluruh variabel independen pada variabel dependen. Sebaliknya,

koefisien determinasi mendekati angka 1, semakin besar efek variabel independen pada variabel dependen.

Ketika Nilai mendekati 1, maka variabel independen hampir memberi seluruh keterangan yang dibutuhkan pada prediksi variasi variabel independen. Secara umum koefisien determinasi buat data silang (*cross section*) relatif rendah lantaran adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan buat data runtutan waktu (*times series*) biasanya memiliki nilai koefisien determinasi tinggi.

3.4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda (*multiple regression*) dimaksudkan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel independent dan variabel dependen (Ghozali, 2011:110). Pengujian tersebut akan meraih hasil dari penolakan atau penerimaan dari hipotesis penelitian. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Realisasi penerimaan PPN dalam negeri di Tenggara

α = Konstanta

X_1 = Pertumbuhan ekonomi regional Tenggara

X_2 = Tingkat inflasi regional Tenggara

β_1 = Koefisien regresi dari pertumbuhan ekonomi regional Tenggara

β_2 = Koefisien regresi dari tingkat inflasi regional Tenggara

e = Error atau Faktor residual

Analisis yang dilakukan dapat diamati pula mengenai uji koefisien determinasi (R^2), uji kelayakan model (uji F), dan uji hipotesis (uji statistik t).

3.4.5 Pengujian Hipotesis (Uji t)

Menurut Gani & Amalia (2014:140) Pengujian hipotesis pada model regresi digunakan agar mengetahui pengaruh nyata (signifikansi) variabel independen (X) pada variabel dependen (Y). Metode yang digunakan menguji tingkat kenyataan variabel dependen terpengaruh variabel independen adalah dengan menggunakan alat uji t (t test). Uji t mempunyai nilai signifikansi 0,05. Kriteria penolakan dan penerimaan hipotesis:

- a. Jika signifikansi $\alpha < 0,05$, terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen pada variabel dependen.
- b. Jika signifikansi $\alpha > 0,05$, tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen pada variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian

Bab ini memaparkan tentang temuan dan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti. Deskripsi data yang disajikan dari hasil penelitian ini adalah untuk memberi gambaran umum mengenai data yang diperoleh dari lapangan yang dianalisis menggunakan regresi berganda untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Tenggarong. Data yang dipakai penelitian ini ialah data pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan PPN tahun 2015-2021 yang berasal dari kantor pelayanan pajak (KPP) pratama Tenggarong.

Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Data diperoleh dalam bentuk data runtut waktu (*tim series*) berupa laporan tahunan dari KPP Tenggarong. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan dokumentasi. Sampel penelitian ini ditentukan dengan teknik sampling jenuh dimana keseluruhan populasi dijadikan sebagai sampel dalam penelitian (Sugiyono,2009) , sampel pada penelitian ini yaitu semua data pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan PPN tahun 2015-2021 yang berada dalam KPP Pratama Tenggarong.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistic deskripsi ini memberikan deskripsi atau gambaran mengenai data pertumbuhan ekonomi dan inflasi sebagai variable independen atau bebas (X), dan PPN sebagai variable dependen atau terikat (Y). Analisis deskriptif

ini memberikan gambaran berupa nilai minimum, maksimum, mean (rata-rata), serta standar deviasi setiap variabel baik variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi maupun variabel terikat yaitu PPN. Hasil analisis statistik deskriptif untuk semua variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PDRB	7	-7.17	3.92	-.3600	4.16475
Inflasi	7	-12.60	15.88	2.7486	10.42878
PPN	7	70.61	108.54	95.0800	16.56841
Valid N (listwise)	7				

Sumber: Lampiran (Output Descriptive Statistics, Data Diolah dengan SPSS 21), 2022

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) sebagai variabel bebas (X_1) memiliki rata-rata (mean) 0,3600, standar deviasi 4,16475, nilai minimum -7,17, dan nilai maksimum 3,92. Inflasi sebagai variabel bebas (X_2) memiliki rata-rata (mean) 2,7486, standar deviasi 10,42878, nilai minimum -12,60, dan nilai maksimum 15,88. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai variabel terikat (Y) memiliki rata-rata (mean) 95,0800, standar deviasi 16,56841, nilai minimum 70,61, dan nilai maksimum 108,54.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

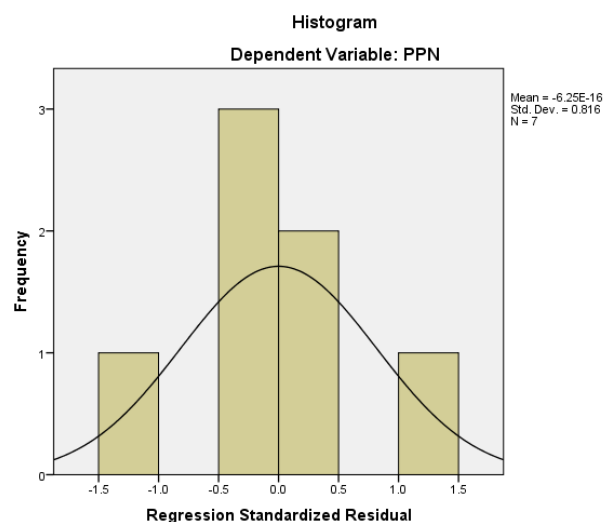
4.2.2.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan taraf signifikan 0,05. Data berdistribusi normal jika nilai signifikan $> 0,05$. Sedangkan jika nilai signifikan $< 0,05$ maka data tidak bertistribusi normal. Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2
Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		7
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.46222918
	Absolute	.238
Most Extreme Differences	Positive	.137
	Negative	-.238
Kolmogorov-Smirnov Z		.630
Asymp. Sig. (2-tailed)		.823

Sumber: Lampiran (Output Uji Normalitas, Data Diolah dengan SPSS 21),2022



Gambar 4.1. Histogram Uji Normalitas

Sumber: Lampiran (Output Uji Normalitas, Data Diolah dengan SPSS 21),2022

Berdasarkan Tabel 4.2, nilai *Asymp. Sig.* adalah 0,823. Oleh karena nilai *Asymp. Sig.* $0,823 > 0,05$ maka artinya data berdistribusi normal dan dapat digunakan untuk pengujian model regresi.

4.2.2.2 Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas pada penelitian ini dapat dilihat dari nilai Tolerance dan nilai VIF. Model regresi bebas multikolonieritas jika nilai Tolerance di atas 0,1

dan nilai VIF di bawah 10. Adapun hasil uji multikolonieritas pada penelitian ini adalah sebagai berikut,

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients^a

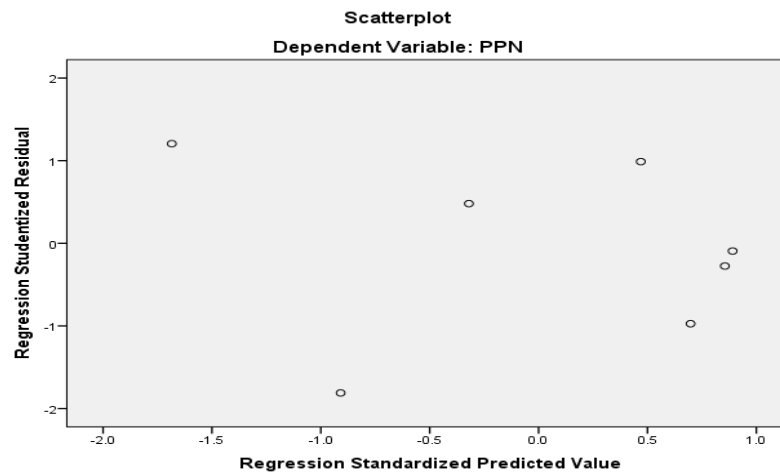
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	95.221	2.838		33.549	.000		
1 PDRB	3.077	.936	.773	3.288	.030	.491	2.037
Inflasi	1.247	.440	.785	2.831	.037	.491	2.037

Sumber: Lampiran (Output Uji Multikolonieritas, Data Diolah dengan SPSS 21),2022

Berdasarkan Tabel 4.3, nilai tolerance dari pertumbuhan ekonomi (PDRB) adalah 0,491 lebih besar dari 0,1. Nilai VIF variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB) adalah 2,037 lebih kecil dari 10. Variabel inflasi memiliki nilai tolerance 0,491 lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF dari variabel inflasi adalah 2,037 lebih kecil dari 10, Sehingga nilai tolerance dari semua variabel lebih besar atau di atas 0,1 dan nilai VIF semua variabel lebih kecil atau di bawah 10. Berdasarkan hal tersebut, maka secara keseluruhan tidak terjadi multikolonieritas pada variabel penelitian ini .

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas penelitian ini dilihat melalui pola titik scatterplot. Jika pola titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Lampiran (Output Uji Heteroskedastisitas, Data Diolah dengan SPSS 21),2022

Berdasarkan gambar 4.2, terlihat bahwa titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0, titik-titik tidak mengumpul di atas atau di bawah saja. Selain itu, penyebaran titik-titik juga tidak membentuk pola. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi dapat dikatakan baik.

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Durbin-Waston. Hasil uji autokorelasi penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.944 ^a	.891	.837	6.68984	1.333

Sumber: Lampiran (Output Uji Autokorelasi, Data Diolah dengan SPSS 21),2022

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, nilai hitung Durbin-Waston adalah 1,333. Jumlah sampel penelitian (n) adalah 7 (dalam tahun) dan jumlah variabel independen (k) adalah 2. Berdasarkan sampel penelitian (n) dan jumlah variabel

penelitian (k) maka pada tabel Durbin-Waston diperoleh nilai d_L sebesar 0,4672 dan d_U sebesar 1,8964. Berdasarkan nilai d_L dan d_U maka diperoleh nilai $4 - d_L$ sebesar 3,5328 dan nilai $4 - d_U$ sebesar 2,1036. Berdasarkan nilai-nilai tersebut maka diperoleh $d_U < DW < 4 - d_U$ ($1,8964 < 1,333 < 2,1036$) sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari autokorelasi.

4.2.3 Uji Kelayakan Model

4.2.3.1 Uji F

Uji F pada penelitian ini digunakan untuk melihat apakah model regresi layak digunakan atau tidak. Model regresi layak digunakan jika nilai signifikan dari F di bawah 0,05. Adapun hasil uji F pada penelitian ini ialah dapat dilihat berdasarkan berikut.

Tabel 4.5
Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1468.059	2	734.029	16.401	.012 ^b
Residual	179.016	4	44.754		
Total	1647.074	6			

Sumber: Lampiran (Output Uji F, Data Diolah dengan SPSS 21),2022

Berlandaskan Tabel 4.5, nilai signifikan sebesar $0,012 < 0,05$. Berdasarkan nilai tersebut, maka dapat dikatakan bahwa model regresi layak digunakan.

4.2.3.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dipergunakan bagi menggambarkan sejauh mana variabel independen menjelaskan variabel dependen atau dengan kata lain, koefisien determinasi dipergunakan besaran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh koefisien determinasi pada penelitian ini ditetapkan berdasarkan melihat nilai Adjusted R Square karena penelitian ini

memiliki 2 variabel independen. Adapun hasil pengujiannya adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.944 ^a	.891	.837	6.68984

Sumber: Lampiran (Output Koefisien Determinasi, Data Diolah dengan SPSS 21),2022

Berdasarkan Tabel 4.6, dapat ditentukan bahwa nilai Adjusted R Square ialah 0,837 atau 83,7%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen pada penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan inflasi mampu menjelaskan variabel dependen yaitu pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 83,7%. Dengan kata lain, nilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah 83,7%.

4.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai dampak variabel independen terhadap variabel dependen dengan bentuk persamaan. Adapun hasil analisis regresi penelitian ini ialah sebagai berikut.

Tabel 4.7
Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	95.221	2.838		33.549	.000		
	PDRB	3.077	.936	.773	3.288	.030	.491	2.037
	Inflasi	1.247	.440	.785	2.831	.037	.491	2.037

Sumber: Lampiran (Output Hasil Analisis Regresi Berganda, Data Diolah dengan SPSS 21),2022

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, diketahui $\alpha = 95,221$, $\beta_1 = 3,077$, dan $\beta_2 = 1,247$. Sehingga diperoleh persesuaian regresi sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 95,221 + 3,077X_1 + 1,247X_2$$

Persesuaian regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Nilai Konstanta (α)

Konstanta (α) pada persamaan regresi di atas adalah 95,221. Artinya apabila variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi bernilai 0 (dianggap konstan) maka variabel dependennya yaitu pajak pertambahan nilai (PPN) akan bernilai 95,221.

b. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) (X_1)

Nilai β_1 pada persamaan regresi adalah 3,077. Artinya apabila pertumbuhan ekonomi naik 1 (bernilai 1) maka pajak pertambahan nilai akan naik sebesar 3,077. Sebaliknya, apabila pertumbuhan ekonomi turun 1 (bernilai -1) maka pajak pertambahan nilai akan turun sebesar 3,077.

c. Inflasi (X_2)

Nilai β_2 pada persamaan regresi adalah 1,247. Artinya apabila inflasi naik 1 (bernilai 1) maka pajak pertambahan nilai akan naik sebesar 1,247. Sebaliknya, apabila inflasi turun 1 (bernilai -1) maka pajak pertambahan nilai akan turun sebesar 1,247.

4.2.5 Pengujian Hipotesis

4.2.5.1 Uji Signifikansi (Uji t)

Uji t bertujuan akan menggambarkan dampak variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau secara satu-satu yaitu apakah ada pengaruh antara pertumbuhan ekonomi (PRDB) terhadap pajak pertambahan nilai (PPN) dan Inflasi terhadap pajak pertambahan nilai (PPN). Kesimpulan dari uji ini diambil berdasarkan nilai signifikan alpha. Jika nilai signifikan alpha $< 0,05$ maka terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen pada variabel dependen. Dengan kata lain, variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji t pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 4.8
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	95.221	2.838		33.549	.000		
	PDRB	3.077	.936	.773	3.288	.030	.491	2.037
	Inflasi	1.247	.440	.785	2.831	.037	.491	2.037

Sumber: Lampiran (Output Hasil Uji T, Data Diolah dengan SPSS 21), 2022

a. Variabel Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Tabel 4.8 terlihat bahwa nilai signifikan dari pertumbuhan ekonomi adalah 0,030. Berdasarkan hal tersebut, maka nilai signifikan pertumbuhan ekonomi $0,030 < 0,05$. Artinya terdapat pengaruh signifikan antara pertumbuhan ekonomi pada pajak pertambahan nilai (PPN) atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pajak pertambahan nilai.

b. Variabel Inflasi

Pada Tabel 4.8 terlihat bahwa nilai signifikan dari inflasi adalah 0,037. Berdasarkan hal tersebut, maka nilai signifikan inflasi $0,037 < 0,05$. Artinya

terdapat pengaruh signifikan antara inflasi pada pajak pertambahan nilai (PPN) atau dengan kata lain, inflasi berpengaruh signifikan terhadap pajak pertambahan nilai.

4.3 Pembahasan

Pada penelitian ini, peneliti hendak menelaah apakah ada pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap pajak pertambahan nilai di Tenggara. Berdasarkan hasil penelitian, pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pajak pertambahan nilai. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut.

4.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa nilai signifikan pertumbuhan ekonomi sebesar $0,030 < 0,05$. Yang dapat dinyatakan bahwa ada pengaruh pertumbuhan terhadap pajak pertambahan nilai. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pajak pertambahan nilai. Pada hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pajak pertambahan nilai. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi juga pajak pertambahan nilainya. Sebaliknya, semakin rendah pertumbuhan ekonomi maka semakin rendah juga pajak pertumbuhan nilainya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah makro ekonomi yang dapat mempengaruhi perubahan pendapatan nasional karena setiap periode masyarakat akan menambah kemampuannya. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka pendapatan masyarakat juga turut meningkat. Tingkat perkembangan ekonomi

dinyatakan atas nilai PDRB. Semakin tinggi angka PDRB suatu daerah, maka semakin tinggi pula pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah termasuk pajak (Nurfajriani,2019) Oleh karena itu, jika PDRB suatu daerah meningkat, artinya kemampuan atau potensi dalam membayar pajak juga meningkat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nasrulloh, 2019) yaitu pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB berpengaruh positif terhadap PPN. Situmeang,(2019) juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Inriama & Setyowati,(2020) pada penelitiannya menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak. Selain itu, Herman, (2007) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dengan PPN memiliki hubungan yang positif.

4.3.2 Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil analisis data, nilai signifikan inflasi adalah sebesar 0,037. Karena $0,037 < 0,05$ maka inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pajak pertambahan nilai (PPN). Sama dengan pertumbuhan ekonomi pada penelitian ini, inflasi memiliki pengaruh positif terhadap pajak pertambahan nilai. Artinya, semakin tinggi inflasi maka semakin tinggi juga pajak pertambahan nilainya. Sebaliknya, semakin rendah inflasi maka semakin rendah juga pajak pertumbuhan nilainya.

Inflasi merupakan indikator dari makro ekonomi karena inflasi mempengaruhi nilai uang. Inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan masyarakat (Astuti, 2015) Dengan demikian, maka inflasi dapat mempengaruhi pajak pertambahan nilai.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ria (2017) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Mustaqimah,(2021) juga mengatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh terhadap pajak pertambahan nilai. Selain itu, Salawati (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh inflasi terhadap PPN, hasil dari penelitian menunjukan inflasi berdampak signifikan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memberikan hasil yang positif dan mempengaruhi dalam pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai 2015-2021. Data yang dipergunakan berdasarkan penelitian ini ialah data pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan penerimaan pajak pertambahan nilai yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggara tahun 2015-2021.

Berlandaskan nilai analisis dan pembahasan, dinyatakan kesimpulan dari penelitian ini ialah .

1. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak pertambahan nilai. Dalam variabel pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari angka PDRB, nilai signifikannya adalah $0,030 < 0,05$. Artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap Pajak Pertambahan Nilai..

2. Variabel inflasi memiliki nilai signifikan sebesar $0,037 < 0,05$. Oleh karena itu, inflasi juga berpengaruh positif signifikan terhadap Pajak Pertambahan Nilai.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap pajak pertambahan nilai pada Kabupaten Kutai Kartanegara, dari hasil tersebut diharapkan pemerintah diharapkan dapat

memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi agar dapat menjaga kesetabilannya sehingga meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah periode penelitian serta variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang memiliki peran dalam penerimaan pajak pertambahan nilai.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanthi, F. (2017). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn). Universitas Telkom.
- Asmara, C. G. (2018). Cuma 15 Kantor Pajak yang Sudah Capai Target 100% Penerimaan. CNBCIndonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181219122018-4-47076/cuma-15-kantor-pajak-yang-sudah-capai-target-100-penerimaan>
- Astuti, W. (2015). Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Makassar Periode 2010-2014. *Ekonomi*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (n.d.). Nilai Pajak Pertambahan Nilai. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. <https://kaltim.bps.go.id/pressrelease.html>
- Gani, I., & Amalia, S. (2014). Belajar Alat Analisis Data (M. Bendata . CV. Andi Offset).
- Hasyim, A. I. (2016). *Ekonomi Makro* (A. I. Hasyim). Kencana.
- Herman. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai. In *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi* (Vol. 7, Nomor 1, hal. 83). <https://doi.org/10.25105/mraai.v7i1.972>
- Inriama & Setyowati. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Foreign Direct Investment dan Tax Rate Terhadap Penerimaan PPh Badan Negara ASEAN.
- Iqraam, M., & Sudibia, I. (2019). Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesempatan Kerja, dan Persentase Penduduk Sektor Informal Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 8(7), 1443–1472.
- Kaniskha, Almira, Herna Renata Kadarisman, H. B. (2016). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Perpajakan*, 9. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Kukar Penyumbang Terbesar Perekonomian Kaltim Capai Rp162 Triliun | Kukarpaper.com. (2021, Juni). <https://kukarpaper.com/kukar-penyumbang-terbesar-perekonomian-kaltim-capai-rp162-triliun/>

- Liony, A. (2016). Kontribusi Pajak KUKAR Terbesar di KPP Tenggarong. *Tribu Kaltim*. <https://kaltim.tribunnews.com/2016/03/21/kontribusi-pajak-kukar-terbesar-di-kpp-tenggarong>
- Mustaqimah siti. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan NiLAI 2017-2019 (Studi Penerimaan PPN pada Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah 1.
- Nasrulloh, N. (2019). Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. 53(9). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Nota Keuangan 2017. (2017). Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- Nur. (2019). PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) <https://ekbangsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pdrb-produk-domestik-regional-bruto-jika-dikaitkan-dengan-ekonomi-wilayah-40>
- Nurfajriani, S. (2019). Pengaruh Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Tegal.
- Nurmantu, S. (2005). Pengantar Perpajakan. In Pengantar Perpajakan.
- online pajak. (n.d.). Mengenal 3 Jenis Jenis Pajak, Perbedaan & Contohnya. Diambil 8 Oktober 2021, dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pengelompokan-jenis-jenis-pajak-dan-penjelasan>
- Online Pajak. (2016). Pajak Pertambahan Nilai PPN. <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppn>
- Puspitha, P. V., & Supadmi, N. L. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pada Penerimaan PPN (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Se-Bali). *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1530. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i02.p26>
- Rahmawati. (2013). Perubahan Tingkat Inflasi Dan Pendapatan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Negara. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 69–80. <https://doi.org/10.15408/sjie.v2i1.2374>
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur 2022. Diambil 18 April 2022, dari <https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-documents/December2021/aZtahdt7VqB7MmCQphHG.pdf>

- Ria, I. (2017). Pengaruh Pendapatan Perkapita, Inflasi dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Indonesia. In Skripsi.
- Sagir, S. (2009). 75 Tahun H. Soeharsono Sagir Lima Dasawarsa Kiprah Guru Ekonomi (1958-2008) Kapita Selektu Ekonomi Indonesia Bersama Para Sahabat (Kencana Prenada Media Group).
- Salam, K. R. (2017). Perpajakan PPh dan PPN.
- Salawati. (2008). Analisis Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN Pada Kanwil DJP Jakarta Selatan. In Ph.D. thesis, Central-South University of Technology, China. Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Situmeang, F. F. (2019). Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Tingkat Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.
- Soemitro Rochmat. (2014). Asas dan Dasar Perpajakan. In Asas dan Dasar Perpajakan (dua, hal. 1–200).
- Sugiyono. (2009). Statistik untuk Penelitian Kuantitatif. Statistik untuk Penelitian Kuantitatif, Ekonomi, 55–136.
- Sukirno, S. (2000). mikro ekonomi. Ekonomi.
- Suparmoko & Sofilda, E. (2014). Pengantar ekonomi makro. In Ekonomi Makro (lima).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Peraturan Pajak. Diambil 21 September 2021, dari <https://peraturanpajak.com/2017/11/27/undang-undang-republik-indonesia-nomor-28-tahun-2009/>
- Utari, C. & P. (2016). Inflasi di Indonesia Karakteristik dan Pengendaliannya.
- UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah [JDIH BPK RI]. Diambil 21 September 2021, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38787/uu-no-42-tahun-2009>
- Waluyo. (2000). Perpajakan Indonesia: Pembahasan sesuai dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan. Salemba Empat.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Data PDRB, Inflasi, dan PPN Kutai Kartanegara

No	Tahun	PDRB (%)	INFLASI (%)	PPN (%)
1	2015	-7.17	-12.60	73.70
2	2016	-1.97	2.59	92.96
3	2017	1.63	14.82	108.41
4	2018	2.61	6.22	107.00
5	2019	3.92	-3.66	104.34
6	2020	-4.21	-4.01	70.61
7	2021	2.67	15.88	108.54

Lampiran 2 : Hasil Output SPSS

1. UJI STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

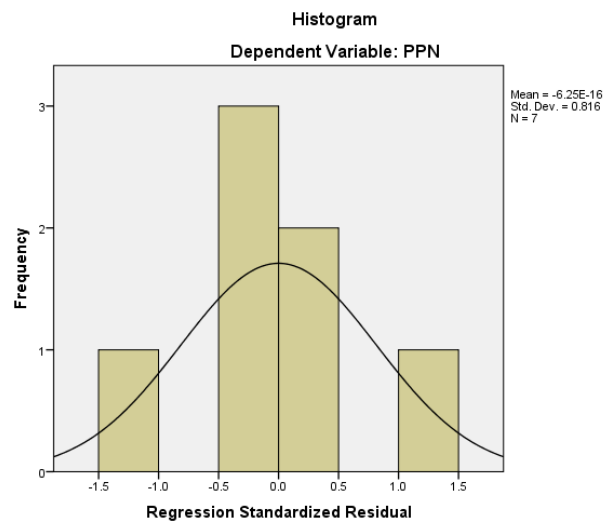
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PDRB	7	-7.17	3.92	-.3600	4.16475
Inflasi	7	-12.60	15.88	2.7486	10.42878
PPN	7	70.61	108.54	95.0800	16.56841
Valid N (listwise)	7				

2. UJI ASUMSI KLASIK

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		7
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.46222918
	Absolute	.238
Most Extreme Differences	Positive	.137
	Negative	-.238
Kolmogorov-Smirnov Z		.630
Asymp. Sig. (2-tailed)		.823

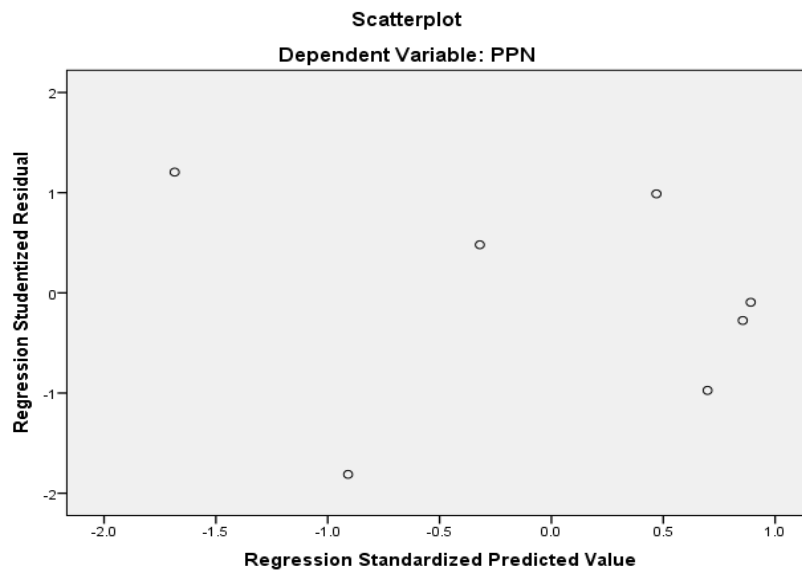


Gambar 4.1. Histogram Uji Normalitas

b. Uji Multikolonieritas

Hasil Uji Multikolonieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	95.221	2.838		33.549	.000		
	PDRB	3.077	.936	.773	3.288	.030	.491	2.037
	Inflasi	1.247	.440	.785	2.831	.037	.491	2.037



c. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.944 ^a	.891	.837	6.68984	1.333

3. UJI KELAYAKAN MODEL

a. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1468.059	2	734.029	16.401	.012 ^b
	Residual	179.016	4	44.754		
	Total	1647.074	6			

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.944 ^a	.891	.837	6.68984

**Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	95.221	2.838		33.549	.000		
	PDRB	3.077	.936	.773	3.288	.030	.491	2.037
	Inflasi	1.247	.440	.785	2.831	.037	.491	2.037

4. UJI SIGNIFIKANSI (UJI t)**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	95.221	2.838		33.549	.000		
	PDRB	3.077	.936	.773	3.288	.030	.491	2.037
	Inflasi	1.247	.440	.785	2.831	.037	.491	2.037